BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penurunan daya dukung lingkungan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang begitu cepat. Negara-negara yang sedang berkembang menghadapi masalah kekurangan sistem sanitasi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan cepat untuk menyediakan fasilitas dan prasarana terutama sanitasi merupakan metode yang sangat penting karena sanitasi berfungsi untuk menjaga kebersihan terutama Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kotoran yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kata *sanitation* yang berarti penjagaan Kesehatan.

Di Indonesia, kondisi sanitasi yang buruk memengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat. 75% sungai tercemar secara signifikan, dengan 58% pencemaran berasal dari limbah rumah tangga, yang sebagian besar merupakan air limbah domistik yang tidak sanitasi diolah. Kesejahteraan ekonomi: kerugian ekonomi sebesar 1,2 juta dolar per tahun akibat sanitasi buruk dari sisi kesehatan: Air, sanitasi dan kebersihan yang buruk, diare adalah 7.1 persen kematian di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan lima puluh persen dari seribu bayi yang dilahirkan di Indonesia meninggal sebelum waktunya. lima tahun dan salah satu faktor penyebaran penyakit adalah kondisi sanitasi yang

buruk dan menjadi stunting pada anak-anak. 1/6 anak perempuan tidak bersekolah ketika Salah satu alasan ketidakcukupan sanitasi adalah menstruasi.[2]

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung merupakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulungagung menjadi perantara dari pemerintah untuk membantu mengelola Alokasi Dana Kusus sanita.[3] Dana Alokasi Khusus Bidang (DAK) Sanitasi, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan, merupakan salah satu program di Bidang Cipta Karya yang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi. Untuk menjamin pelaksanaan program DAK Sanitasi.

Bidang Sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung tahun 2024, yaitu pembangunan tangki septik, diperlukan monitoring dan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan pembangunan tangki septik ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat sehingga pencemaran tidak ada lagi. Pada dasarnya progam Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi dalam pembangunan tangki septik skala individual ini Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

---

[2] Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, Wiwiek Rindayati, 2019 *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara,* Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, No.1, Hal. 49-58

[3] Perkim-tulungagung.go.ig diakses pada tanggal 30 September 2024

Tulungagung pada tahun 2024 ini memberikan ke 18 desa terpilih, dan setiap desa akan di bangun 50 unit tangki septik. Progam ini secara tidak langsung juga mendukung kesehatan dan memberikan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Program ini membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah lokal dan sesuai dengan tujuan nasional. DAK untuk bidang sanitasi secara khusus dialokasikan untuk membiayai sarana sanitasi masyarakat yang tidak memenuhi standar tertentu atau untuk mendorong pembangunan wilayah lebih cepat.

Saat ini, masalah sanitasi di perkotaan menjadi sangat penting.[4] Salah satu masalah yang paling menantang bagi negara berkembang ketika timbunan sampah, manajemen air limbah, dan sistem drainase tidak mampu mengendalikan dan beroperasi dengan baik. Kondisi ini akan berdampak luas, baik secara ekologis dan sosial. Kekurangan fasilitas dan sanitasi akan berdampak buruk terhadap kondisi melawan kondisi lingkungan dan kesehatan. Akibatnya, pemerintah mendorong terpenuhinya meskipun hingga saat ini, cakupan layanan sanitasi diperkotaan dan di pedesaan tidak mencukupi.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk Masyarakat dibutuhkan tata pemerintah yang baik salah satu unsurnya yaitu akuntabilitas.

---

[4] Ning Mukti Indrayani, Lhery Swara Oktaf Adhania, 2024 *Pelaksanaan Program DAK Sanitasi Tangki Septik Individu Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang,* Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, No. 1, hlm. 49–58

Dalam rangka mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi maka di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung dalam melaksanakan hak kewenangan dan kewajiban. Dalam menemukan kemam puan dan potensi yang dimiliki oleh Masyarakat diharapkan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan yang dapat dipertanggangjawabkan.

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan itu, pemerintah desa dapat melakukan hal yang sama untuk meningkatkan akuntabilitas menghasilkan peningkatan kinerja pada hasil, dengan demikian akuntabilitas adalah sebagai bukti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan. kebijakan yang dipercaya untuk mencapai tujuan melalui media dan laporan akuntabilitas berkala.[5]

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitai ini. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam program atau kegiatan yang dilakukan di masyarakat lokal. Ini termasuk keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan,

[5] Swasanay Winantuningtyas Titi, Widyaiswara, *Akuntabilitas Kinerja*, (Jakarta: 2019), Hal. 10.

pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk, serta kegiatan yang memungkinkan beberapa orang atau kelompok untuk membuat keputusan publik.[6]

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi yang disalurkan setiap dua tahun sekali ke desa merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius agar dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara optimal. Hal ini penting mengingat tujuan utama penyaluran DAK Sanitasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima, yang selaras dengan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai wujud akuntabilitas, dinas memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang transparan, sehingga kinerjanya dapat dievaluasi secara objektif. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama terkait kurangnya pemahaman berbagai pihak mengenai mekanisme pengelolaan DAK Sanitasi. Salah satu contoh yang kerap terjadi adalah minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program di tingkat desa. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan informasi dan berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan dana tersebut.[7]

Oleh karena itu, setiap program DAK Sanitasi yang telah direncanakan memerlukan akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam perspektif Akuntansi Syariah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk menjaga

---

[6] Bahtiar Noerma Alifahrani, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, (Universitas Airlangga: 2017), Vol. 5, Hal. 10.

[7] Ariani Ida, *Akuntabilitas Pengelolaan..*, (Makassar: 2021), Hal. 7

amanah, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, serta menghindari pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kepercayaan publik, tetapi juga demi meraih keridhaan Allah SWT. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan harus mengutamakan nilai-nilai serta ajaran syariah, sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan tidak terbatas pada ranah duniawi, melainkan juga memiliki konsekuensi di akhirat. Dengan penerapan prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan DAK Sanitasi dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana akuntabilitas pengelolaan DAK Sanitasi memengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada implementasi akuntabilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung. Adapun penelitian ini diberi judul "IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SANITASI 2024 UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TULUNGAGUNG". Penulis berharap bahwa dengan mengeksplorasi sejauh mana implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi dapat diterapkan secara optimal, penelitian ini mampu memberikan kontribusi pada terciptanya transparansi, partisipasi publik,

dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

1) Bagaimana Transparansi Akuntabilitas pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 2024 dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung?
2) Bagaimana Efisinesi dan Efektifitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 2024 dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung?
3) Bagaimana partisipasi masyarakat Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 2024 dalam pengambilan keputusan serta pengawasan publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Transparansi Akuntabilitas pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 2024 dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung.
2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efisinesi dan Efektifitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 2024 dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung.

3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 2024 dalam pengambilan keputusan serta pengawasan publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi yang dilakukan setiap dua tahun sekali ke desa belum sepenuhnya disertai dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala pemahaman mekanisme pengelolaan DAK Sanitasi, baik di tingkat pemerintah desa maupun masyarakat penerima manfaat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program di desa menjadi salah satu permasalahan yang menonjol, ditambah dengan minimnya keterbukaan informasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai penggunaan serta pertanggungjawaban dana.

Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan nilai dan ajaran Akuntansi Syariah, khususnya dalam pencata tan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman jika tidak diimbangi dengan transparansi dan pelibatan publik yang memadai.

E. Batasan Penelitian

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah , Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.[8]Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas maka peneliti memberikan batasan penelitian yang fokus mengenai Implementasi Akuntabilitas Dana Khusus (DAK) Sanitasi 2024 untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Tulungagung.

F. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis, penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi para akademis dimana dapat mengetahui tata Kelola dana alokasi khusus sanitasi melalui prinsip akuntabilitas yang baik. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, dinas dan juga Masyarakat.
2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan materi perkuliahan dan memberikan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan

[8] Johana Veronika Simanjuntak, Journal of Law, *Administration, and Social Science* Volume 4 No.2, 2024

kepercayaan Masyarakat tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan yang telah ditetapkan.

G. Penegasan Istilah

1. Implementasi

   Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan atau rencana yang melibatkan pihak-pihak terkait, langkah-langkah strategis, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Proses ini juga mencakup pemantauan dampak dan kemajuan yang dicapai setelah kebijakan atau program dijalankan.

2. Akuntabiliatas

   Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.[9]

3. Dana Alokasi Khusus

   Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana APBN yang ditransfer pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendukung kegiatan khusus, terutama penyediaan sarana dan prasarana fisik sesuai prioritas nasional. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan pertumbuhan dan pelayanan publik antar daerah, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

[9] Swasanany Winantuningtyas Titi, *Akuntabilitas Kinerja*..., Hal. 18

kelautan-perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.[10]

4. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat adalah keyakinan atau harapan yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu terhadap seseorang, kelompok, atau institusi tertentu yang jujur, andal, dan integritas. Pengalaman, interaksi sosial, dan reputasi dapat membentuk kepercayaan ini. Dalam arti yang lebih luas, kepercayaan masyarakat juga mencakup hubungan antara orang-orang dalam hal nilai, norma, dan aturan yang disepakati.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini berisi pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penlitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasa istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI: Pada bab ini berisi kajian Pustaka, yang memuat teori-teori tentang akuntabilitas Dana Alokasi Khusus Sanitasi untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini berisi metode penelitian yang memuat tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

---

https://www.kajianpustaka.com/2020/11/dana-alokasi-khusus-dak.html Diakses 30 September 2024

BAB IV HASIL PENELITIAN: Pada bab ini berisi hasil penelitian memuat tentang tinjauan umum instansi seperti profil instansi, struktur organisasi, laporan hasil penelitian dan hasil analisis data penelitian.

BAB V PEMBAHASAN: bab ini berisi pembahasan memuat tentang analisis pembahasan masalah yang berhubungan dengan, implentasi akuntabilitas Dana Alokasi Khusus Sanitasi untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VI PENUTUP: Pada bab ini berisi penutup memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran peneliti terhadap instansi atau penelitian selanjutnya.

Bagian Akhir, merupakan bagian yang memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.